

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI HARYA ILMIAH.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Obyek dan Subyek Penelitian	15
3. Data Penelitian dan Bahan Hukum.....	16

4. Tekhnik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	18
5. Analisis Penelitian.....	18
F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis	19
1. Kerangka Konseptual.....	19
2. Kerangka Teoritis.....	20
a. Teori Keadilan Bermartabat	20
b. Teori Hak dalam Hukum Tanah di Indonesia.....	32
G. Sistematika Penulisan	37
H. Jadwal Penelitian	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Sistem Hukum	40
1. Bentuk Penyerahan Bagian-Bagian Hak Pengelolaan	45
2. Hukum, Antara Pemegang HPL dengan Pihak Ketiga dalam Mempergunakan Hak Pengelolaan	50
3. Surat Keputusan Pemberian Hak	54
4. Pengertian Pelepasan atau Penyerahan HAT	58
B. Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HAT Negara dan Hak Pengelolaan	63
1. Mekanisme Pemberian HAT Individual atau Kolektif	68
2. Pemberian HM PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999	69
3. Pemberian HGU PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999	74

4. Pemberian HGB PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999	80
5. Pemberian Hak Pakai PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999	89
6. Pemberian HPL PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999	97
7. Mekanisme Cara Pemberian HAT Secara Umum.....	101
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	126
A. Deskripsi Hasil Penelitian (Temuan) Mengenai Akibat	
Hukum Penerbitan Sertifikat HPL di atas Tanah Adat di Sorong	
Papua	128
1. Pihak-Pihak Terdampak atau Terkena Akibat dari	
Penerbitan Sertifikat HPL di atas Tanah Adat di Kabupaten	
Sorong	130
2. Peristiwa Hukum yang Memunculkan Akibat Hukum	
dari Penerbitan Sertifikat HPL di atas Tanah Adat	
Suku Malamoi Kota Sorong	134
3. Perubahan atas Dalil dalam Gugatan (Petitum)	142
4. Kekaburan Gugatan dan Kurangnya Pihak	
(Akibat Hukum dari Ketidaktepatan Dasar Gugatan)	147
5. Rasiolegis dalam Mengupayakan Terhindarnya Akibat	
Hukum Penerbitan Sertifikat HPL di Atas Tanah Adat	153
6. Pelepasan atas Hak Tanah Adat Harus Diketahui Ahli Waris	
Tanah Adat	158
7. Pertimbangan Majelis Hakim dan Amar Putusan Banding	164

8. Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat HPL di atas Tanah Adat di Kota Sorong; Perspektif Mahkamah Agung	169
9. Pemda Berkewajiban Membayar Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Adat	183
10. Konsep Tanah Adat Murni Milik Perorangan Bukan Tanah Negara	186
11. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	204
B. Pembahasan/Analisis Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat HPL di atas Tanah Adat	207
1. Analisis Mengenai eksistensi Hak Pengelolaan (HPL)	
Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia	208
2. Analisis/Pembahasan Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat HPL di atas Tanah Adat	212
3. Analisis Hambatan dalam Upaya Menyelaraskan HPL	
dengan Hukum Pertanahan di Indonesia dan Solusinya.....	216
BAB IV PENUTUP	219
A. Simpulan.....	219
B. Saran.....	224
DAFTAR PUSTAKA	